

PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI
PELAKSANAAN *GOOD POLITICAL PARTY GOVERNANCE*
(STUDI KASUS **DPW** PARTAI KEADILAN **SEJAHTERA** JATIM)

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH
GELAR SARJANA AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI



DIAJUKAN OLEN :

KHOIRUL HADI KUSUMA
No. **Pokok** : **040117273**

KEPADA
FAKULTAS EKONOMI DAN **BISNIS**
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
2009

ABSTRAKSI

Menurut sebagian besar masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa parpol identik dengan korupsi. Berdasar survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei dilakukan pada 26 Oktober hingga 5 November 2008 yang melibatkan 2197 responden dengan toleransi kesalahan 2 persen. Metode yang digunakan multistage random sampling dan hasilnya Sekitar 58 persen pemilih tak bisa menunjukkan partai mana yang paling bersih dari korupsi. Padahal parpol inilah nanti yang akan memimpin dan mengatur negara beserta segala sesuatu yang berada di dalamnya, sehingga diperlukan sebuah tata kelola yang baik dari partai politik (*good political party governance*).

Untuk mewujudkan *good political party governance* tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 676 Tabun 2003 dan beberapa peraturan dan perundangan yang lain untuk mendukung dalam mewujudkan *good political party governance*. Pelaporan keuangan dari partai politik yang mencerminkan *good political party governance* mencerminkan dari pelaksanaan tiga komponen yaitu: akuntabel, manajerial dan transparansi.

Studi kasus penelitian ini dilakukan di Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jatim (DPW PKS Jatim). PKS merupakan organisasi parpol yang mempunyai basis massa kaum intelektual Islam yang selama tiga periode pemilu pada era reformasi selalu turut ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut. Laporan keuangan yang sudah dibuat adalah laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas. Dalam memenuhi tujuan akuntabilitas, manajerial dan transparansi, DPW PKS Jatim masih perlu melakukan pembenahan khususnya dalam masalah manajerial dan transparansi. Hal ini ditandai dengan kurang rapinya struktur pengendalian internal dan juga masih belum dilakukannya publikasi atas laporan keuangan kepada publik.

Kata Kunci : GCG, *good political party governance*, PKS, partai politik